

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Konsep pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dua konsep yang sering digunakan dalam membahas Ekonomi Pembangunan dan pada dasarnya tidak lepas dari kaidah-kaidah ilmu ekonomi pembangunan baik secara mikro maupun makro. Pembahasan ilmu ekonomi (*economics*) selalu berkaitan terutama dengan efisiensi dan alokasi sumber-sumber produktif yang langka (*scarcity*) dan dengan pertumbuhan yang optimal dari sumber-sumber itu untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar, sedangkan ekonomi pembangunan mempunyai ruang lingkup (*scope*) yang lebih luas dan kompleks.

Ekonomi pembangunan sebagai ilmu, selain berkaitan dengan alokasi sumber-sumber produktif yang langka dengan efisiensi dan sekaligus dengan pertumbuhannya, ekonomi pembangunan banyak bersangkut paut dengan formulasi kebijakan pemerintah baik ekonomi maupun non-ekonomi yang di antaranya dengan melibatkan variabel-variabel ekonomi makro secara langsung seperti income, investasi, kesempatan kerja (*employment*) dan gabungan faktor-faktor non-ekonomi yang sama-sama relevan seperti alokasi sumber daya alam yang efisien, perbaikan institusional, usaha-usaha perbaikan diri, nilai-nilai, sikap-sikap ekonomi dan politik baik dilakukan pemerintah maupun swasta untuk mempercepat dan memperbesar skala tingkat hidup.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pada upaya-upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat atas GDP (*Gross Domestic Product*) yang disertai dengan perombakan dan modernisasi dari sektor-sektor ekonomi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*) sedangkan Pertumbuhan ekonomi lebih kepada upaya kenaikan GDP dan tidak memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak.

Meskipun tidak semua teori atau model dapat digunakan, namun perbincangan mengenai peranan faktor pengeluaran termasuk buruh, tanah, modal dan pengusaha boleh menjelaskan sebab-sebab berlakunya ketiadaan pembangunan dalam sebuah negara. Pada awalnya, pendapatan perkapita menjadi pengukur utama bagi pembangunan suatu daerah jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang menaik. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus-menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik dan penurunan ekspor dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami penurunan tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat sementara dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

1. Teori Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu negara atau daerah dalam jangka panjang yang disertai oleh

perbaiki sistem kelembagaan (Arsyad 1999: 6). Berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama. Dengan cara tersebut bisa diketahui beberapa peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*discontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan 2000: 125).
- b) Menurut Irawan dan Suparmoko (1999: 5) pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.
- c) Sadono Sukirno (1985: 13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

- d) Menurut Sumitro Djojohadikusumo (Sanusi 2004: 8) pembangunan ekonomi adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- e) Todaro (Irawan dan Suparmoko 1999: 5) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Todaro dalam (Arsyad 1999: 5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 (tiga) nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan pokoknya (*basic needs*); 2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia; dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural. Perubahan tersebut terjadi pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Perubahan peranan sektor ekonomi dalam pembentukan pendapatan nasional disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain : (1) adanya hukum *Engels (Law of Engels tentang Elasticity of Income)* yang menyatakan semakin tinggi pendapatan karena dilakukan pembangunan terus menerus akan meningkatkan konsumsi terhadap barang-barang industri dan konsumsi terhadap barang pertanian relatif tetap; (2) adanya perubahan struktur produksi industri yang bersifat *compulsory* dan *inducive* secara terus menerus; (3) adanya *comparative advantage* pada produk-produk sektor pertanian bagi negara-negara berkembang, sedangkan negara-negara yang sudah maju memiliki *competitive advantage* pada produk-produk sektor industri (Mahyudi, 2004).

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan

suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad 1999: 108).

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Sehingga pembangunan daerah memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam penelitian ini pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Keberhasilan pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Jadi pendapatan wilayah menggambarkan perekonomian pada suatu daerah dengan menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi pada daerah tersebut (Tarigan, 2005).

3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber data publik dan sektor swasta, petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar dan organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

(Arsyad 1999: 104)

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi daerah antara lain:

1. Usaha untuk mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (*steady social economic growth*). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan yang positif.
2. Usaha perluasan kesempatan kerja
3. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
4. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi, hal ini sering disebut usaha diversifikasi ekonomi
5. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai *distributive justice*.
6. Usaha untuk pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan

7. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi, ada beberapa alasan perlunya perencanaan pembangunan ekonomi (Arsyad 1999: 23). Beberapa alasan tersebut meliputi:

- 1) alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan;
- 2) perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap berkesinambungan;
- 3) stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Boediono dalam Tarigan (2004: 44) dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Jadi, persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa perekonomian akan terus berlanjut. Ekonomi dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil perkapita.

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2000: 4), ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal, sedangkan masalah Negara maju terkait pada

pertumbuhan karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu.

Menurut Simon Kuznets (Todaro 2000: 144) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Selain itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo (Sanusi 2004: 8) pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ($PDRB_t$) dengan PDRB sebelumnya ($PDRB_{t-1}$)

$$\text{Laju Pertumbuhan } (\Delta Y) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi (M.L Jhingan 2000: 67):

a. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh dan banggunya

merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut akan dibahas dibawah ini:

1) Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang sangat penting. Suatu negara atau daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat dikatakan sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi.

3) Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko di antara ketidakpastian.

4) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

5) Pembagian Kerja dan Skala Prioritas

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Dengan ini laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

b. Faktor Nonekonomi

Selain adanya faktor ekonomi, faktor nonekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Faktor non ekonomi tersebut meliputi :

1) Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba dalam rangka memaksimalkan output berdasarkan input tertentu. Kebebasan agama dan ekonomi

mendorong perubahan pandangan dan nilai sosial sehingga sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

2) Faktor Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka.

Penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan dua cara berikut. *Pertama*, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. *Kedua*, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Persyaratan yang paling penting bagi laju pertumbuhan industri adalah manusia. Manusia, di atas segalanya yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerinya atau daerahnya.

3) Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu daerah. Sedangkan administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup akan sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi.

Profesor Kuznets (Todaro, 2000: 144) juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi. Karakteristik proses pertumbuhan ekonomi tersebut meliputi: 1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi; 2) tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi; 3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi; 4) tingkat

transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; 5) adanya kecenderungan negara-negara (daerah) yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia atau daerah lainnya sebagai daerah pemasaran dari sumber bahan baku yang baru; dan 6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia.

5. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (*turnpike*)

Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (TPJC) atau *turnpike* diperkenalkan oleh Samuelson 1955. Pada intinya teori ini menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditas apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *comparative advantage* untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cepat besar.

Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa di ekspor keluar daerah atau ke luar negeri. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Menggabungkan jalur cepat dan mensinergikan dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

6. Teori Basis Ekspor Richardson

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) dalam teorinya Richardson menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad 1999: 116). Dalam teori basis ekonomi (*economic base*) mengemukakan bahwa sebuah wilayah merupakan sebuah sistem sosio-ekonomi yang terpadu. Teori inilah yang mendasari pemikiran teknik *location quotient*, yaitu teknik yang membantu dalam menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat keswasembadaan (*Self-sufficiency*) suatu sektor.

Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan-perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (*economic base theory*). Menurut Glasson dalam Ghalib (2005: 166), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu:

- a. Sektor Basis merupakan kegiatan yang mengekspor barang-barang dan pelayanan ke luar wilayah ekonominya atau memasarkan barang-barang dan pelayanan kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan wilayah ekonominya.
- b. Sektor Nonbasis adalah kegiatan yang menyediakan barang-barang dan pelayanan untuk keperluan penduduk yang tinggal di wilayah ekonomi sendiri, sektor bukan basis tidak mengekspor barang atau pelayanan ke luar wilayah.

Meningkatnya jumlah kegiatan basis ekonomi di suatu daerah akan membentuk arus pendapatan ke daerah tersebut. Dengan meningkatnya arus pendapatan tersebut akan meningkat pula permintaan akan barang-barang dan pelayanan di daerah tersebut yang dihasilkan oleh sektor bukan basis. Sebaliknya, menurunnya kegiatan sektor basis di suatu daerah akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke daerah tersebut dan akan mengurangi permintaan terhadap sektor bukan basis. Oleh karena itu kegiatan sektor basis berperan sebagai penggerak utama bagi setiap perubahan dan berpengaruh ganda terhadap daerah tersebut.

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999: 300). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah *Location Quotien (LQ)*. *Location Quotient* dimaksudkan untuk mengukur tingkat spesialisasi (relatif) suatu sektor atau subsektor ekonomi suatu wilayah tertentu (Ghalib 2005: 368). Dalam teknik *LQ* berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

Selain menggunakan analisis *Location Quotient*, ada teknik analisis lainnya yang digunakan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari teknik *Location Quotient* yaitu dengan menggunakan analisis *Shift Share*. Analisis *Shift Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian dalam 3 (tiga) bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu:

- a) Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
- b) Pergeseran proporsional (*Proportional Shift*) mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan acuan.
- c) Pergeseran diferensial (*Differential Shift*) menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan.

Analisis *Shift-Share* ini memiliki keunggulan. Beberapa keunggulan antara lain:

- 1) Memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi, walau analisis *Shift Share* tergolong sederhana; 2) Memungkinkan seorang

pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat; 3) Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat.

Richardson mengakui bahwa teori basis ini cukup sederhana, sehingga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain, sebagai berikut:

- 1) Besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah
Artinya semakin besar suatu daerah, maka eksportnya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatannya.
- 2) Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, seperti: Pengeluaran, Bantuan Pemerintah Pusat, Investasi, dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- 3) Dalam melaksanakan studi atas satu wilayah, *multiplier* basis yang diperoleh adalah rata-ratanya dan bukan perubahannya. Menggunakan *multiplier* basis rata-rata, sering kali memberikan hasil yang keliru apabila ada tendensi perubahan nilai *multiplier* dari tahun ke tahun.
- 4) Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan sebagai alat proyeksi, maka masalah *time lag* (masa tenggang) harus diperhatikan.

7. Model Pertumbuhan Interegional

Model pertumbuhan ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, itulah sebabnya

maka dinamakan model interregional. Dalam model ini di asumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat (Tarigan, 2004).

8. Pembangunan Daerah

Menurut Lincolin Arsyad dalam bukunya yang berjudul *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, pengertian daerah berbeda-beda tergantung aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999: 107-108):

1. Suatu dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya, geografisnya dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

a. Masalah Pokok Pembangunan Daerah

Masalah pokok pembangunan daerah yaitu terletak pada pola pengambilan kebijaksanaan dalam pembangunan ekonomi yang sesuai dengan potensi daerah serta kondisi daerah tersebut. Pelaksanaan pembangunan daerah perlu diupayakan

keselarasannya berkesinambungan antara sektor-sektor terkait, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah.

b. Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam GBHN adalah program pembangunan daerah dan program pembangunan sektor yang selaras sehingga keduanya mencerminkan prioritas daerah bersangkutan dan memberi sumbangan kepada pembangunan nasional. Beberapa kemajuan dicapai dalam pembangunan daerah. Dari sisi politis penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemekaran provinsi dan kabupaten/kota telah memberikan ruang gerak kepada masyarakat di daerah untuk mempercepat pembangunan daerah. Disamping itu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berkurangnya pengangguran, meningkatnya akses masyarakat kepada jaringan infrastruktur (khususnya transportasi dan telekomunikasi) maupun fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun demikian peningkatan kondisi sosial dan ekonomi tersebut relatif tidak merata dan sangat bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

c. Strategi Pembangunan Daerah

Agar tujuan dan sasaran pembangunan suatu daerah dapat tercapai maka pelaksanaannya harus bertumpu pada strategi pembangunan daerah tersebut.

Secara konseptual dan operasional strategi pembangunan daerah mencakup empat strategi, yaitu:

1. Strategi makro, karena pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
2. Strategi sektoral, perlu diterapkan dalam hubungannya dengan aspek pertumbuhan dan kebijaksanaan trilogi pembangunan nasional.
3. Strategi nasional, yang berorientasi pada aspek pemerataan.
4. Strategi pemilihan program atau proyek, ini penting dalam rangka pendayagunaan potensi daerah dan penetapan prioritas pembangunan daerah.

Strategi makro dijabarkan dalam strategi dan regional, mengingat perencanaan pembangunan nasional memerlukan dua pengarahan yaitu:

1. Pengarahan sektoral, yaitu sektor-sektor apa dan seberapa jauh masing-masing sektor-sektor akan dikembangkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.
2. Pengarahan regional yaitu daerah-daerah mana dan berapa besar masing-masing daerah itu akan dikembangkan dalam rangka sasaran nasional.

9. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2007: 2) yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Penghitungan PDRB dapat

dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu langsung dan tidak langsung (alokasi).

1. Metode Langsung

Penghitungan metode langsung ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil penghitungan yang sama (BPS 2007: 3). Adapun penghitungan PDRB secara langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut:

a. PDRB Menurut Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui pendekatan nilai tambah (*value added*).

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan atau sektor ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan ini banyak digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (*output*) dan nilai biaya antara (*intermediate cost*), yaitu bahan baku atau penolong dari luar yang dipakai dalam proses produksi (Tarigan 2004: 23).

Sesuai dengan namanya yaitu PDRB, yang dihitung dalam hal ini adalah nilai produksinya dalam bentuk barang atau fisik. Dalam praktiknya, produk ini dihitung berdasarkan sektor-sektor yang menghasilkannya, yaitu (Suherman Rosyidi 2006: 107): 1) sektor pertanian; 2) sektor pertambangan dan pengalihan; 3) Sektor Industri Pengolahan; 3) sektor listrik, gas, dan air bersih; 4) sektor bangunan; 5) sektor perdagangan, hotel, dan restoran; 6) sektor pengangkutan dan komunikasi 7) sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan 8) jasa-jasa.

b. PDRB Menurut Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Penghitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji dan surplus usaha, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto (BPS 2007: 4).

c. PDRB Menurut Pendekatan Pengeluaran (*Expend Approach*)

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik (BPS 2007: 4).

2. Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto atau netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alat ukur tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor (Tarigan 2004: 24).

Cara penyajian PDRB adalah sebagai berikut:

- a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- b) PDRB Atas Dasar Harga Konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Siti Nurwahidah (2004) dalam tesis yang berjudul "*Analisis Sektor unggulan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa*". Tujuan penelitian pada tesis ini adalah ingin mengetahui struktur pertumbuhan perekonomian sektor unggulan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa tahun (1997–2002). Hasil Analisis LQ (*Location Quation*) menunjukkan sektor pertanian, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor basis di Kabupaten Sumbawa. Hasil analisis LQ kontribusi sektor selama periode penelitian (1997–2002) sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Sumbawa. Hasil analisis *Shift Share* menunjukkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kabupaten Sumbawa dapat meningkat sebagai akibat pengaruh pertumbuhan ekonomi Propinsi. Hasil analisis *Klassen Typology* menunjukkan Kabupaten Sumbawa termasuk daerah maju tetapi tertekan. Hasil analisis regresi dan uji t sumbangan PDRB sektor pertanian menunjukkan pengaruh signifikan terhadap total PDRB, sementara subsektor pertanian tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDRB sektor pertanian.

I Dewa Made Darna Setiawan dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB)*. Pendekatan model yang digunakan dengan alat analisis Input-Output (I-O) Multiregional. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat lima (5) sektor ungula yang meliputi industri makanan dan minuman, Sektor Perdagangan (di Propinsi Jawa Timur), Sektor Hotel dan

Restoran, Sektor Peternakan dan hasil-hasilnya (di Propinsi Bali), Sektor Industri makanan, minuman dan tembakau dan hotel dan restoran (di Propinsi Nusa Tenggara Barat). Pertumbuhan sektor-sektor tersebut akan berdampak pada output, nilai tambah bruto, dan penyerapan tenaga kerja intra dan interregional. Di tingkat nasional, pertumbuhan sektor unggulan di Propinsi Jawa Timur, Bali berdampak lebih besar bila dibandingkan dengan dampak pertumbuhan sektor unggulan di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Penelitian Azhar, Syarifah Lies Fuaidah dan M. Nasir Abdussamad (2003), tentang *Analisis Sektor Basis dan Non Basis di Propinsi Nangro Aceh Darussalam*. Hasil penelitiannya ditemukan yang menjadi sektor basis adalah; sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan serta sektor pertanian, sedangkan sektor lainnya menjadi sektor non basis.

Penelitian Mujib Saerofi (2005) tentang *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Semarang (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan Swot)*. Tujuan penelitiannya adalah menentukan sektor yang potensial yang terdapat di Kabupaten Semarang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hasil penelitiannya diperoleh dua sektor ekonomi yang potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang. Kedua sektor yang potensial tersebut adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa dengan Indeks LQ lebih besar dari satu (sektor basis) dan komponen diferensial (Dj) positif (pertumbuhan cepat).

Penelitian Nanang Gilang Prayogo (2008) tentang Analisis Sektor Unggulan dengan menggunakan analisis Input–Output (I-O). Tujuan penelitiannya adalah ingin melihat sektor unggulan dari 2 (dua) periode. Hasil penelitian menunjukkan, sektor unggulan bahwa sektor unggulan di Jawa Tengah tahun 2000 adalah sektor industri makanan, minuman dan tembakau, sektor industrilainnya, sektor industri pengilangan minyak dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Tahun 2004 hanya terdapat dua sektor yang menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah yaitu sektor industri makanan, minuman dan tembakau, dan sektor industri lainnya.

Syaiful Turuy dalam penelitiannya tentang “*Analisis Penentuan Sektor Perekonomian Unggulan Pripinsi Maluku Utara*”. Model yang digunakan adalah Inpu-Output (I-O) 1. Tujuan penelitiannya adalah ingin menentukan sektor perekonomian unggulan di Maluku Utara pada tahun 2001 dengan mengklasifikasikan 24 x 24 sektor dan dianalisis melalui dua (2) pendekatan yaitu analisis struktur dengan indikator pendekatan kedepan (*forward approach*) dan kebelakang (*backward approach*) dan analisis kondisi perekonomian dengan indikator angka pengganda output dan pengganda pendapatan. Hasil penelitiannya diperoleh adalah bahwa: (a) Analisis struktur dengan indikator Indeks dayapenyebaran tertinggi adalah Sektor Perdagangan sebesar (2,166) diikuti oleh Sektor Perikanan (1,766) lalu Pertambangan dan Penggalian (1,456), Tanaman bahan makanan (1,2053), Angkutan Laut (1,1702), sedangkan sektor lainnya penyebarannya kecil; (b) Analisis perekonomian dengan pendekatan angka pengganda menunjukkan bahwa, angka pengganda output tertinggi adalah Industri Pengolahan (1,9254), diikuti Sektor Air bersih (1,8601), Restoran (1,8466), Bangunan (1,8249), Listrik (1,8069), angka pengganda pendapatan menunjukkan

bahwa Sektor Jasa Pemerintahan Umum menempati peringkat pertama (1,1027), diikuti Sektor Pertambangan dan Penggalan (0,7726), Tanaman Pangan (0,7320), Perdagangan (0,6558) dan Perkebunan (0,6004).

Dengan menggunakan klasifikasi sektor atas dasar Indeks Daya Penyebaran dan Indikator Angka Pengganda, menunjukkan bahwa Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor unggulan dalam membentuk perekonomian di Propinsi Maluku Utara.

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, Pertama penelitian ini menggunakan daerah penelitian yang lebih kecil yaitu di Kabupaten Lampung Timur. Kedua penelitian ini selain analisisnya menggunakan LQ, Analisis *Shift Share*, juga dilakukan pengukuran Tipologi Sektoral dengan tujuan selain menemukan sektor unggulan diharapkan dapat diketahui katagori tipologi sektoral. Ketiga penelitian ini akan sekaligus dapat menjawab bahwa Kabupaten Lampung Timur yang dikenal sebagai daerah penghasil komoditi tanaman perkebunan telah bergeser ke struktur ekonomi non pertanian yang mampu memberikat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

C. Kerangka Pemikiran

Adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah satu dengan daerah lainnya merupakan fenomena yang umum dijumpai, terutama di Negara berkembang. Namun tentunya bukan sebuah alasan yang tepat untuk kemudian membiarkan situasi tersebut terus berlangsung. Perbedaan tingkat pembangunan tersebut dipengaruhi oleh banyak hal seperti ketersediaan sumber daya alam,

tenaga kerja, luas daerah, pasar ekspor, kebijakan pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dari laju pertumbuhan pendapatan daerah yang bersangkutan sehingga upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada hakikatnya adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

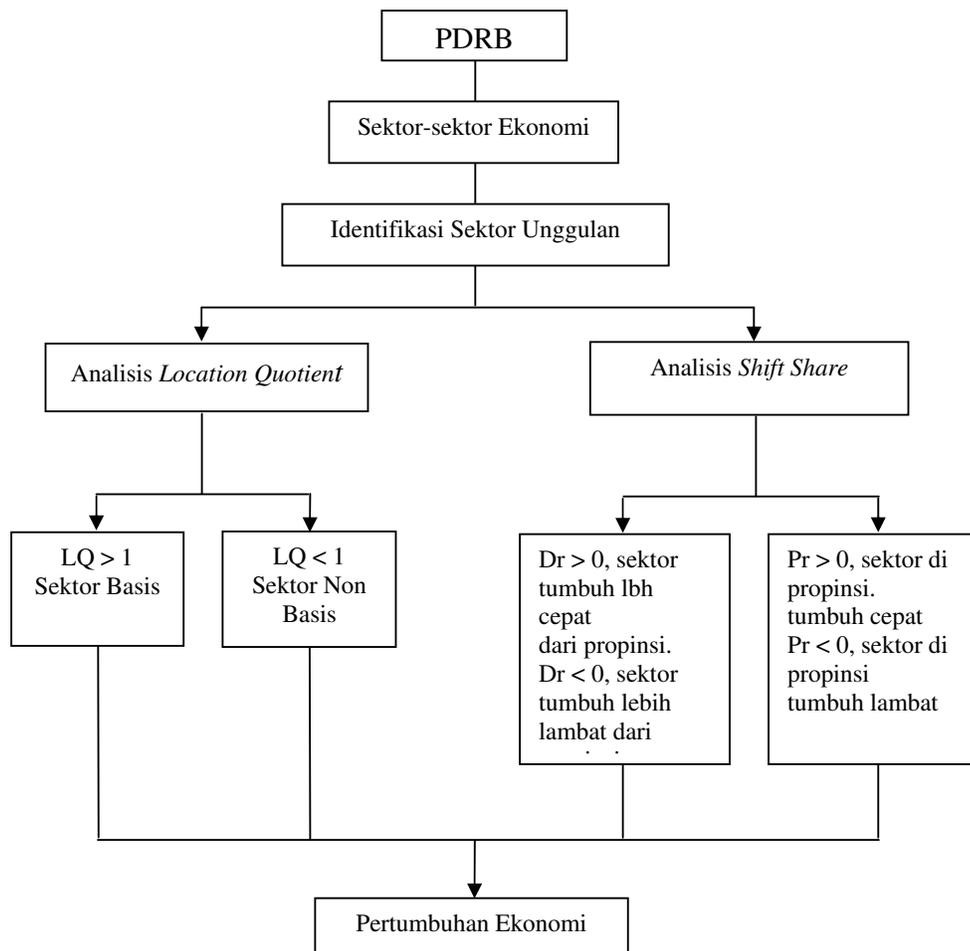
Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam region maupun antar region dan mengembangkan ekonomi secara sektoral maupun antar lintas sektoral yang lebih menguntungkan didukung dengan strategi peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

Pertumbuhan suatu daerah terjadi sebagai akibat adanya permintaan barang dan jasa tertentu terhadap suatu daerah oleh daerah lainnya. Semakin tinggi permintaan luar daerah dapat dipenuhi berarti semakin tinggi pula aktivitas perekonomian lokal dan pertumbuhannya. Pertumbuhan daerah berdasarkan pendekatan wilayah yang sangat umum dikenal adalah teori pertumbuhan berbasis ekspor. Teori pertumbuhan berbasis ekspor didasarkan atas pemikiran bahwa suatu wilayah harus meningkatkan arus atau aliran langsung dari luar wilayah agar bisa tumbuh secara efektif yaitu dengan cara meningkatkan ekspor. Teori pertumbuhan berbasis ekspor memisahkan kegiatan ekonomi dalam dua sektor yang terpisah, yaitu sektor basis dan sektor non basis.

Dalam pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto adalah indikator ekonomi yang paling penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto terdiri atas dasar harga berlaku yang digunakan

untuk mengetahui pergeseran dan struktur ekonomi dan atas dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Teori yang digunakanlah yaitu teori basis ekonomi dengan menggunakan metode *Location Quotient* dan metode *Shift Share* sehingga dapat diketahui sektor-sektor unggulan (potensial) yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur. Bagan kerangka pemikiran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur melalui pendekatan basis ekonomi dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur

Dasar pertimbangan Kabupaten Lampung Timur dipilih sebagai daerah penelitian adalah selain Kabupaten ini sebagai salah satu kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Lampung Tengah memiliki ciri spesifik sebagai daerah penghasil komoditas pertanian yang telah mengalami pergeseran ke sektor lainnya seperti perdagangan serta industri pengolahan dan jasa-jasa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Timur terus meningkat, ada kecenderungan peningkatan pertumbuhan ekonomi ini karena ada komoditas unggulan yang mampu memacu pergerakan ekonomi daerah.

Dengan pendekatan wilayah di Kabupaten Lampung Timur potensi ketersediaan dan pemberdayaan sumber daya alamnya telah mampu meningkatkan pertumbuhann ekonominya. Hanya saja belum teridentifikasi sektor unggulan yang mana yang mampu menggerakkan perekonomian di Kabupaten Lampung Timur.

Dari hasil penelitian setelah diketemukan sektor-sektor unggulan maka akan dianalisis secara deskriptif peluang Agribisnis yang mampu berperan disektor-sektor unggulan tersebut nialai tambahnya (*added of value*) yang akan didapat dari masing-masing sektor unggulan dalam kontribusinya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Lampung Timur untuk masa yang akan datang akan menjadi lebih besar.